



Eksekutif Dorong Transparansi Laporan Banpol

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta mendorong transparansi laporan pertanggungjawaban bagi partai politik yang memperoleh bantuan keuangan (banpol). Kalangan eksekutif menilai, hal itu merupakan keniscayaan untuk menjaga peran parpol sebagai pengawal demokrasi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, Budi Santosa, di sela agenda "Knowledge Transfer Forum untuk Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol", mengungkapkan, bahwa parpol memiliki peran penting di sistem demokrasi.

Dalam kesempatan itu, Bakesbangpol menghadirkan deretan narasumber

dari BPK Perwakilan DIY, Bappeda dan BPKAD Kota Yogyakarta. Ia menyebut, sejauh ini, harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan, belum terjamin sepenuhnya.

"Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan parpol adalah keniscayaan. Karena sebagai institusi publik, parpol mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi, serta mengelola pemerintahan," tandasnya, di sela kegiatan, Selasa (15/11).

Menurutnya, knowledge transfer forum digelar untuk meningkatkan pemahaman terkait pengadministrasian dan pembuatan laporan pertanggungjawaban bantu-

an keuangan parpol secara akuntabel. Terlebih, hal itu sudah diatur Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

Adapun bantuan keuangan yang dikucurkan Pemkot Yogya sebesar Rp770 juta untuk delapan partai politik di wilayahnya. Kedelapan parpol itu, meliputi, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), PPP, serta Partai Demokrat.

Sementara besaran bantuan politik yang diterima masing-masing pun berbeda, selaras torehan suara yang diperoleh pada Pemilu 2019 lalu. Sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku, setiap satu suara yang didapatkan parpol bernilai Rp3.446. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005